

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
(PNPM MPd SPP) DI DESA TELUK BUTON KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2008-2012**

INRA RAHMAT

DOSEN PEMBIMBING : Drs.H.ISRIL, MH

Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

e-mail : iin.ermarsuna@yahoo.com

081266383174

Abstract: The implementation of the National Program for Community Empowerment Rural Savings and Loans Group Women (PNPM MPd SPP) on Buton Bay Village Natuna regency Year 2008-2012 .The fact that there is in the field indicate that SPP MPd PNPM program is not running as it should due to the arrears by the beneficiary the SPP funds. This is why the village of Buton Bay sanction program is not given anymore MPd SPP PNPM program in this village, and the sanctions lasted for three years from 2009 until 2012. The results of this study indicate that there are several factors that cause delinquency SPP funds, the first socialization program poorly due to lack of participation of women in the socialization, both SPP funds are not used for business activities, the three knowledge and user education tuition funds are low as undermining the loan because the funds should free help from the government, lack of coordination because the four rural locations that are difficult Buton Bay taken.

Abstrak : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM MPd SPP) di Desa Teluk Buton Kabupaten Natuna Tahun 2008-2012.Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa program PNPM MPd SPP ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terjadi penunggakan oleh pemanfaat dana SPP tersebut. Hal inilah yang menyebabkan desa Teluk Buton mendapatkan sanksi program yaitu tidak diberikannya lagi program PNPM MPd SPP di desa ini, dan sanksi ini berlangsung selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2012.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penunggakan dana SPP tersebut, pertama sosialisasi program yang kurang baik dikarenakan kurangnya partisipasi kaum perempuan pada sosialisasi tersebut, kedua tidak digunakannya dana SPP tersebut untuk kegiatan usaha, ketiga pengetahuan dan pendidikan pengguna dana SPP tersebut yang rendah karena menyepelkan pinjaman karena menganggap dana tersebut bantuan gratis dari pemerintah, keempat kurangnya koordinasi karena lokasi desa Teluk Buton yang sulit ditempuh.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, PNPM MPd, Simpan Pinjam,

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat, dengan kata lain telah mengakar luas dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, semakin memperparah kondisi masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya masyarakat miskin, merosotnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat.

Oleh sebab itu, fenomena yang seperti itu perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), yang diatur berdasarkan Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat No.25/kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK yaitu berupa: keberhasilan menyediakan lapangan kerja dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar (Fisik) yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal)

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya loka (tidak termasuk penambahan modal)
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

Pada PNPM MP ini terdapat berbagai program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir bagi kaum perempuan, yaitu Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Pada prinsipnya SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga.

Pada tahun 2008 PNPM MPd SPP ini juga dilaksanakan di Kabupaten Natuna dengan alokasi dana dari APBN dan APBD. Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara merupakan salah satu desa yang mendapatkan program PNPM MP SPP ini dengan dana SPP sebesar 60 juta Rupiah pada tahun 2008, Jumlah kelompok pemanfaat dana SPP ini sebanyak tiga kelompok yang mana masing-masing kelompok berjumlah lima orang. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.4000.000. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu 12 bulan, dengan di cicil sebesar Rp 383.500 per bulannya. Akan tetapi berdasarkan laporan UPK Kecamatan Bunguran Utara terdapat tiga desa yang menunggak dana SPP ini dan Desa Teluk Buton merupakan desa yang tinggi penunggakannya. Akibat penunggakan ini Desa Teluk Buton mendapatkan sanksi program yaitu tidak diberikannya lagi dana SPP tersebut sampai tahun 2012.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan program PNPM MPd Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) di Desa Teluk Buton Kabupaten Natuna Tahun 2008-2012.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan program PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton pada tahun 2008-2012 dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala didalam pelaksanaan program PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton pada tahun 2008-2012

Berdasarkan dengan masalah yang telah di rumuskan maka tujuan penelitian ini adalah

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Pada dasarnya, penelitian implementasi merupakan suatu cara untuk mengetahui bagaimana suatu program dari suatu kebijakan itu dilaksanakan, serta mencari tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah program. Maka indikator yang akan dipergunakan sesuai denganteori Edward III yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengarah pada pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran keadaan secara objektif di lapangan, kemudian di lanjutkan dengan interpretasi data agar dapat menjelaskan atau menganalisa masalah serta dapat memberikan jawaban terhadap Pelaksanaan PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna tahun 2008-2009. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan yaitu peneliti memilih sampel dengan kriteria informan yang benar-benar memahami tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini serta memiliki posisi penting di instansi bersangkutan. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi dan wawancara. Setelah diperoleh semua data kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif kemudian di lakukan analisis secara deskriptif dengan jalan menggambarkan dan menguraikan secara seksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas

. HASIL dan PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton

Sesuai dengan alur kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional PNPM Mandiri Perdesaan SPP terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

1. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa sosialisasi pada perencanaan kegiatan kurang baik, karena kurangnya partisipasi dari kaum perempuan pada saat sosialisasi program.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa penetapan usulan dan musyawarah desa informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Sub indikatornya yaitu penyaluran dana SPP kepada kelompok perempuan.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Teluk Buton tidak berjalan dengan baik karena terjadinya penunggakan oleh dua kelompok pemanfaat dana SPP tersebut. Penunggakan tersebut terjadi karena kelompok tersebut tidak menggunakan dana SPP tersebut untuk keperluan usaha tetapi untuk keperluan lainnya.

3. Pelestarian Kegiatan

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Pelestarian ini mengarahkan kepada adanya pemeliharaan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan simpan pinjam merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak

terpeliharanya atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan diketahui bahwa pelestarian kegiatan SPP di Desa Teluk Buton tidak berjalan dengan baik karena Desa Teluk Buton mendapatkan sanksi program yaitu tidak diberikannya lagi PNPM MPd SPP selama tiga tahun semenjak tahun 2009 sampai tahun 2012 karena terjadinya penunggakan yang tidak terselesaikan selama tiga tahun tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton

Pelaksanaan adalah proses atau perbuatan melaksanakan dari suatu keputusan untuk mencapai suatu tujuan suatu kebijakan atau program. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitu juga dengan pelaksanaan program PNPM MP SPP yang ada di Desa Teluk Buton Kabupaten Natuna.

Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, sikap-sikap, dan birokrasi terhadap pelaksanaan Program PNPM MP SPP yang ada di Desa Teluk Buton, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

a. Transmisi atau penyampaian informasi

Proses penyampaian informasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program PNPM MP SPP kepada masyarakat. Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM MP kepada masyarakat luas dalam hal ini adalah masyarakat pemanfaat SPP.

Proses penyampaian informasi dilakukan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan diketahui bahwa penyampaian informasi program PNPM MPd SPP ini tidak berjalan dengan baik karena masih ada pemanfaat dana yang tidak mengetahui tentang tujuan kegiatan SPP tersebut.

b. Kejelasan Informasi

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kebingungan dan perbedaan persepsi antara keinginan komunikator dengan penerima informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyampaian informasi yang jelas mengenai kegiatan SPP di Desa Teluk Buton ini kurang baik karena tidak semua pemanfaat dana yang mengetahui secara jelas mengenai kegiatan SPP ini.

c. Konsistensi Informasi

Dalam komunikasi antara pelaksana program, tidak hanya merupakan suatu proses penyampaian pesan, tetapi juga merupakan proses interaksi yang saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan adanya konsistensi dan kepastian informasi yang disampaikan harus diperhatikan, agar tidak berbeda diantara satu pihak dengan pihak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan program SPP telah ada konsistensi sesuai dengan informasi yang sudah diberikan sebelumnya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian pelaksana program. Selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.

a. Staf

Dalam hal ini yaitu dari aspek kuantitas dan kualitas pelaksana serta kualitas dari masyarakat pemanfaat dana. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan kebijakan sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dalam menduduki posisi pegawai PNPM telah memiliki persyaratan dan seleksi khusus. Jadi kemampuan pegawai PNPM ini sudah baik dalam melaksanakan program SPP ini. Selain itu jumlah pegawai PNPM pun sudah cukup memadai.

Adapun kendala yang ditemui di lapangan pada tim pelaku PNPM MPd di kecamatan dan desa adalah kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dari masyarakat yang ikut berpartisipasi.

b. Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana ketersediaan informasi yang cukup bagi pelaksana akan mendukung pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sumberdaya informasi berupa pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan dapat menyebabkan ketidakseriusan pelaksana untuk memenuhi tanggungjawabnya, sehingga menimbulkan berbagai kendala. Begitu juga dengan pelaksanaan program SPP ini, diperlukan adanya ketersediaan informasi yang diperlukan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara pelaksana untuk melaksanakannya. Adapun informasi yang diperlukan berupa tingkat ekonomi masyarakat maupun hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun ketersediaan informasi seperti informasi mengenai data penduduk yang tergolong kedalam RTM (Rumah Tangga Miskin) juga diperlukan oleh pihak pelaksana PNPM MP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa informasi bagi para pelaksana mengenai kebutuhan masyarakat desa telah diperoleh melalui musyawarah desa seperti informasi penduduk yang tergolong ke dalam Rumah Tangga Miskin dan usulan-usulan kebutuhan desa.

c. Kewenangan

Sumber daya lain yang juga penting dalam implementasi suatu program adalah adanya wewenang yang diberikan kepada pelaksana program. Tentu saja dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka diperlukan pendelegasian wewenang dari pejabat pembuat program kepada pelaksana program di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa kewenangan yang paling besar adalah berada di tangan Pegawai PNPM MP seperti wewenang memberikan surat teguran kepada penunggak, kewenangan menyelesaikan masalah, dan kewenangan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi pelanggaran.

d. Fasilitas

Selain beberapa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung dari sumber daya adalah ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu program. Salah satu fasilitas pendukung yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui telah ada fasilitas yang baik yang telah disediakan untuk menunjang pelaksanaan program SPP di Desa Teluk Buton yaitu berupa kantor sekretariat dan peralatan komputer.

3. Disposisi

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program, dimana pelaksana program kadang kala bermasalah apabila pelaksana yang terkait di dalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik yaitu memiliki persepsi yang berbeda dengan pembuat program, maka biasanya ditempuh penyelesaian ataupun antisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai yang memiliki dedikasi yang baik serta pemberian insentif.

a. Penempatan Pegawai

Adapun salah satu faktor yang penting dalam pelaksana suatu program yaitu penempatan pelaksana program. Dalam implementasi Program SPP ini terdapat beberapa pelaksana diantaranya PJOK, Fasilitator dan pelaksana pada UPK dan TPK dimana mereka melalui tahap seleksi terlebih dahulu untuk menilai kompetensinya apakah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa penempatan pegawai pelaksana sudah baik yaitu melalui tahapan seleksi guna memperoleh pelaksanaan yang sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan.

b. Insentif

Selain dengan penempatan pegawai yang sesuai, yang memiliki persepsi atau sikap yang sama dengan pembuat program kebijakan guna pencapaian tujuan, maka salah satu juga yang berpengaruh terhadap sikap dan komitmen pelaksana, yaitu dengan pemberian insentif yang memadai. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pada pelaksanaan program SPP insentif yang diberikan kepada TPK yaitu sebesar 10 % dari dana proyek PNPM yang dialokasikan ke Desa Teluk Buton. Tetapi pegawai TPK tidak mendapatkan gaji bulanan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan di dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga diperlukan adanya koordinasi.

a. SOP (Standar Operating Procedur)

Pelaksanaan suatu program memerlukan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan PNPM ini khususnya SPP, sudah disediakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Jadi semua prosedur-prosedur maupun aturan-aturan yang harus diikuti sudah ada didalam PTO tersebut

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang berkenaan dengan program SPP ini telah tercantum didalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dan PTO ini memang telah diikuti dan dipatuhi dengan baik oleh pelaksana program.

b. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat tersebut.

Berdasarkan penelitian dilapangan diketahui adanya kendala didalam koordinasi yang dilakukan kepada pelaksana program yang ada di Desa Teluk Buton, yaitu lokasi Desa Teluk Buton yang jauh dan sulit ditempuh, hal inilah yang mengakibatkan kurang baiknya koordinasi yang dilakukan kepada pelaksana program yang ada di Desa Teluk Buton.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PNPM MPd SPP di Desa Teluk Buton pada tahun 2008-2012 kurang baik, ini disebabkan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu tidak digunakannya dana SPP tersebut untuk kegiatan usaha tetapi digunakan oleh pemanfaat untuk keperluan lain yang bukan untuk usaha. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penunggakan pinjaman SPP tersebut. Karena para penunggak tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman akhirnya Desa Teluk Buton mendapatkan sanksi program yaitu tidak diberikannya lagi program PNPM MPd SPP di desa ini. Karena tunggakan tersebut tidak juga terselesaikan akhirnya Desa Teluk Buton mendapatkan sanksi selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Masalah penunggakan ini akhirnya terselesaikan pada tahun 2012 yaitu setelah turunnya pihak kepolisian ke desa ini untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya Kepala Desa Teluk Buton menggunakan uang pribadinya untuk melunasi tunggakan tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM MPd SPP di desa Teluk Buton ini adalah:
 1. Komunikasi, yaitu masih ada beberapa pemanfaat dana SPP yang tidak menghadiri musyawarah desa sosialisasi tentang kegiatan SPP ini dan hal ini menyebabkan pemanfaat dana ada yang tidak memahami tujuan tersebut SPP.
 2. Sumberdaya, yaitu sumberdaya masyarakat pemanfaat dana SPP yang kurang memadai yang mana berpendidikan rendah.
 3. Disposisi, yaitu dalam hal ini masih kurang dalam aspek insentif yang mana TPK tidak mendapatkan gaji bulanan.
 4. Struktur Birokrasi, yaitu masih terkendala pada aspek fragmentasi yang mana kurangnya koordinasi dari pelaksana di kecamatan kepada pelaksana di Desa Teluk Buton karena lokasi desa Teluk Buton yang jauh dari ibu kota kecamatan dan sulit ditempuh.

2. Saran

Dalam pelaksanaan PNPM MPd SPP ini, masih ditemui beberapa hambatan dalam beberapa aspek, dimana hal tersebut dapat mengganggu berjalannya proses implementasi. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan PNPM MPd SPP berikutnya, yaitu:

1. Berkaitan dengan komunikasi ada baiknya jika penyampaian informasi dari pelaksana kegiatan SPP ini harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat desa, sehingga informasi tersebut dapat diterima secara baik oleh masyarakat pemanfaat dana SPP tersebut dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini peran pelaksana program sangatlah penting. Mereka harus bersikap lebih tegas lagi terhadap aturan-aturan yang diberlakukan, serta sanksi bagi masyarakat yang menyalahi aturan benar-benar harus cepat dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda lagi selama bertahun tahun, sehingga masyarakat tidak akan bertindak semaunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Islami, Irfan. 1998. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembanguna Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy, Analisis, Strategis, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nogi, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology 1*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nogi, Hessel dan Wibowo, Eddi. 2004. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenanda Media.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo
- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Peraturan Perundangan :

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007
Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 20 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda No 23
Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Natuna.

Peraturan Bupati Natuna No 22 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Internet :

www.bps.go.id

<http://www.haluankepri.com/news/natuna/17109-desa-teluk-buton-masih-tertinggal.html>

www.detikriau.net

<http://www.pnpm-perdesaan.or.id/>